KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kunker DPR jadi ajang intip proyek pemerintah?
Tanggal : Senin, 16 Mei 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Diungkapkan Formappi

Kunker DPR Jadi Ajang Intip Proyek Pemerintah?

Bukannya berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPR dicurigai menggunakan kegiatan turun ke daerah sebagai buat ngintipin proyek pemerintah.

KECURIGAAN ini diungkapkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Baginya, kunker DPR selama ini kurang efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sebab, sebagian anggota DPR melakukan kunker bukan untuk berdialog dengan masyarakat, tapi cuma *ngintipin* proyek pemerintah.

"Kunker DPR lebih banyak dilakukan untuk meninjau proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah. Kunker juga dilakukan untuk melihatnya potensi-potensi yang bisa digarap untuk dieksekusi dalam proyek berikutnya," ucapnya kepada wartawan, kemarin.

Lucius sangat jarang melihat anggota DPR kunker untuk memantau pelaksanaan undang-undang, sosialisasi, atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang ada, anggota DPR datang ke suatu lokasi proyek. Di sana, mereka juga bertemu dengan para pemegang proyek tersebut.

Direktur Eksekutif Akar Rumut Stategic Consulting Dimas Oky Nugroho mengamini kecurigaan Lucius tadi. Kata dia, memang ada sebagian anggota DPR yang motivasinya hanya untuk mencari proyek dan menumpuk harta.

"Jadi, praktik seperti itu bisa saja terjadi. Karena memang kualitas anggota DPR beragam. Dari sisi motivasi, tidak semua bertekad memajukan politik dan memperkuat demokrasi. Ada anggota DPR yang memang mencari proyek untuk mengganti modal politik yang sudah digunakan waktu Pemilu," ucapnya, tadi malam.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Selama ini, KPK sudah banyak menangkap anggota DPR yang bermain di proyek pemerintah. Yang terbesar adalah yang dilakukan Nazaruddin. Sedangkan kasus teranyar adalah ditangkapnya anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.

Dimas menduga, aksi ini didorong dengan gaya hidup mewah dan elite DPR. Mereka seakan-akan ingin memperlihatkan ke publik sebagai orang kelas tinggi. Punya rumah mewah dan mobil mentereng. Sehingga, saat gaji tak mencukupi, mereka mulai mencari-cari proyek yang bisa dimainkan.

Untuk mencegah main proyek ini, KPK harus lebih galak. "Belajar dari kasus Damayanti, KPK harus kerja ekstra ketat. Sebab, dengan adanya Banggar saat ini, posisi anggota DPR menjadi sangat strategis dan menentukan. Jadi, KPK harus terus pantengin kalau ada anggota DPR yang mau nyopet. Termasuk yang dilakukan melalui kunker," ucapnya.

Bagaimana tanggapa DPR? Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil terlihat kesal. Dia menantang Formappi menunjuk hidung anggota DPR yang mencari proyek di balik kunker ke daerah. Dia mau, Formappi tidak asal bicara tanpa punya bukti.

"Kalau memang benar ada, tunjukan batang hidung anggota dewannya. Kalau berani ngomong, harus jantan dengan menunjukkan buktinya," tegas politisi PKS ini.

Nasir tidak masalah jika Formappi memiliki bukti dan mampu menunjukkan nama-nama anggota DPR pencari proyek. Tapi, jika cuma menuduh, pihaknya akan menempuh jalur hukum karena Formappi sudah mencemarkan institusi DPR. "Bukan tidak mungkin kami menuntut mereka," ancamnya.

Anggota Komisi II Rufinus Hotmaula justru menuding Formappi tidak paham dengan mekanisme kunker. Formappi hanya melihat kunker di media tanpa meneliti hasil keseluruhan yang dilakukan dewan. "Mereka sama sekali tidak mengerti hasil kunker kami," ucapnya, kemarin.

Dia mengakui, beberapa anggota DPR memang kunker dengan melihat proyek pemerintah. Namun, hal itu bukan berarti main proyek. Kunjungan itu hanya untuk memastikan bahwa proyek dijalankan dengan baik dan selesai sesuai target.

"Kalau dalam proyek itu ada masalah, akan kami sampaikan saat rapat dengan mitra kerja kami di Senayan. Jadi, bukan untuk mencari proyek," tandasnya. ■ QAR